

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan Umum

Atas dasar hasil penelitian dan pembahasannya, berikut ini disajikan kesimpulan yang bersifat umum dan kesimpulan yang bersifat khusus. Seluruh kesimpulan terdiri atas disusun dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian sebagai fokus dalam penelitian ini. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Guru adalah Lentera di kalah bagi anak-anak terpencil, terisolir dan tertinggal yang hidup dalam kegelapan secara pendidikan. Guru merupakan pembangkit hidup di saat anak-anak Papua kehilangan arah dan tersesat dalam menjalani kehidupan yang di daerah terpencil, terisolir dan tertinggal, berkat gurulah anak-anak Papua menemukan jati diri mereka yang sesungguhnya. Sebaliknya jika tidak ada guru anak-anak bangsa kehilangan masa depan mereka.

Guru adalah pelita yang dapat menerangi manusia-manusia Indonesia yang hidup di dalam dunia padam, jika tidak ada guru maka mereka tidak bias dapat melihat dunia lain dan masa depan mereka pun hilang. Kekosongan guru di sekolah Kabupaten Yahukimo merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, karena

pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan melalui Otonomi khusus provinsi Papua. Namun keadaan pendidikan semakin hancur karena setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah berdominan kepentingan. Hal ini dilihat dari penempatan sumber daya manusia di Dinas pendidikan tidak sesuai dengan bidang akademiknya sehingga perencanaan, proses pelaksanaan, pengawasan, pembinaan guru, pembimbingan dalam penyelenggaraannya tidak berjalan sesuai tujuan pendidikan itu sendiri.

Djamarah (2010:30) mengatakan bahwa “Guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik, guru mempunyai kekuasaan membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa”.

Fokus utama dalam tata kelola guru sekolah dasar di daerah 3T lebih khususnya Kabupaten Yahukimo adalah penyelenggara pendidikan buka satuan pendidikan banyak tetapi belum pernah dilakukan analisis kebutuhan guru sekolah dasar, sehingga semua sekolah di Kabupaten Yahukimo mengalami kekurangan guru dan pengangkatan guru honorer daerah yang seharusnya tidak memenuhi syarat. Hal ini dilihat dari guru-guru honorer daerah yang diangkat oleh pemerintah daerah adalah rata-rata lulusan SD, SMP dan SMA (Non Pendidikan). Kemampuan yang mereka miliki pun sama dengan siswa sehingga hasil proses pembelajaran (hasil kelulusan) sekolah dasar hampir sebagian besar tidak bisa membaca dan menulis.

Cakupan dalam tata kelola guru yang menjadi sumber permasalahan di kabupaten Yahukimo adalah kendala geografis daerah yang sangat terisolasi dengan pegunungan sehingga semua aspek pembangunan maupun akses infrastruktur yang sangat sulit. Hal ini membuat pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa tuntas karena mengangkut bahan bangunan semua dari kota dan menggunakan pesawat dengan biaya charteran rata-rata 25.000.000 s/d 60.000.000 (dua puluh lima sehingga enam puluhan juta rupiah).

Terkait kendala geografis daerah tersebut penempatan guru-guru dari luar Yahukimo yang sangat mempertarukan nyata di lapangan karena keterbatasan perumahan guru, keterbatasan sarana prasarana pembelajar

Dalam Penelitian tentang tata kelola guru sekolah dasar di daerah terpencil, terisolir dan tertinggal (3T) Kabupaten Yahukimo provinsi Papua ini menjadi kesimpulan bahwa jumlah Kecamatan dan jumlah Desa mempengaruhi satuan pendidikan sekolah dasar. Semakin banyak jumlah kecamatan dan jumlah desa, maka semakin banyak pula membuka sekolah dasar di setiap desa tanpa mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan guru. Kendala geografis juga menjadi masalah utama dalam penyelenggaraan pendidikan Dasar. Dari kecamatan ke Desa harus menggunakan pesawat atau berjalan kaki selama satu -3 tiga hari. Kendala yang lainnya adalah orangtuanya titip anak di kampung lain dia harus membayar satu-dua ekor babi kepada orangtua anak tersebut. Dengan dasar itulah pemerintah membuka sekolah Dasar di masing-masing kampung. maka kebutuhan guru juga bertambah hingga 960 (Sembilan Ratus Enam Puluh) guru untuk 160 sekolah Dasar belum termasuk guru bidang studi.

Kekurangan dan kebutuhan guru sekolah dasar adalah masalah besar yang harus ditangani serius dengan mengedepankan kerjasama banyak pihak seperti pemerintah, pemerintah daerah , pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat. Kehadiran guru di sekolah sangat diperlukan karena guru adalah lentera di kala seluruh cahaya didunia padam, guru adalah pembangkit hidup disaat anak-anak bangsa kehilangan arah dan sesat dalam menjalani kehidupan, berkat gurulah anak-anak bangsa menemukan jati diri mereka yang sesungguhnya.

Posisi guru belum dapat digantikan oleh siapapun, karena jabatan guru merupakan profesi seperti dokter, jika kita melihat perbedaan antara peran guru dan dokter. dokter mengobati satu orang pasien dan salah mengobati meninggalnya satu orang saja. Tetapi guru salah menerangkan pelajaran kepada satu kelas sejumlah anak yang ada di kelas tersebut semua menerima ajaran yang salah. Karena itu guru perlu diperhatikan dengan koalifikasi pendidikan pada profesi keguruan dan

memberikan pelatihan secara berkesinambungan supaya setiap guru memiliki materi pedagogik ilmu keguruan yang benar.

Guru di daerah 3T sering diabaikan oleh penyelenggara pendidikan, sementara peranan dan tugas seorang guru di daerah terpencil sangat berat, terkadang ia harus bangun pagi pergi mandi di kali, mencuci pakaian sendiri, masak sendiri, menahan lapar di kelas, siswa lebih susah diatur, seorang guru yang memikul tugas yang berat seperti ini perlu diperhatikan kesejahteraan mereka, terkadang mereka tidak menghitung jam mengajar karena satu sekolah hanya satu guru dan jumlah siswa lebih banyak di banding jumlah guru yang ada.

Pendidikan di daerah terpencil perlu didukung oleh semua pihak terutama pemerintah pusat dalam hal ini kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Bentuk dukungan yang dimaksud adalah pendanaan dalam pengadaan guru, sarana prasarana untuk guru, pelatihan guru, program Afirmasi khusus untuk guru sekolah Dasar, dan memberikan dana alokasi khusus dengan jumlah yang besar agar menuntaskan pemondokan bagi guru-guru untuk demi memajukan pendidikan nasional.

B. Kesimpulan Khusus

1. Fokus utama dalam tata kelola guru sekolah dasar Kabupaten Yahukimo.

Guru adalah lentera dikalah Perspektif pemerintah berkenaan dengan Guru yang bertugas di daerah 3T hingga kini masih menggunakan kacamata yang sama dengan ASN yang bertugas di perkantoran (structural). Perubahan paradigma mengenai pementingan Guru SD di daerah 3T tidaklah similar dengan ASN structural perkantoran. Sebab Guru Menghadapi banyak tantangan dan hambatan guna menjalani panggilan bagi peningkatan isi proses pembelajaran. Mata hati pemerintah daerah dan pemerintah Pusat mesti terbuka melihat kenyataan sulitnya mereka menjalankan tugas pengabdianya. Posting anggaran kesejahteraan Guru di daerah 3T mesti terpisah dengan posting anggaran Guru di daerah perkotaan yang sudah lebih modern.

Guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik, guru mempunyai kekuasaan membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa. Namun dalam kenyataan tata kelola guru di daerah 3T Kabupaten Yahukimo bahwa guru itu tidak penting dengan anggapan demikian guru pergi ketempat tugas atau tidaknya tergantung pada guru itu sendiri, lebih parah lagi adalah tempat tinggal guru yang tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah dalam hal ini kepala dinas pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dan pimpinan yang lebih tinggi dari keluarga besar pendidikan di suatu daerah.

Dalam pembahasan fokus utama dalam tata kelola guru sekolah dasar di Kabupaten Yahukimo yang menjadi temuan bahwa jumlah guru yang seharusnya adalah 1002 (seribu dua) guru yang harus di tempatkan pada 160 sekolah Dasar, namun kenyataan yang terjadi pada semua sekolah dasar di Kabupaten Yahukimo adalah 348 (tiga ratus empat puluh delapan) guru. Hal ini memberikan simpulan bahwa kebutuhan guru sekolah dasar di Kabupaten Yahukimo lebih tinggi daripada guru yang tersedia bahkan diperkirakan lebih besar kebutuahn gurunya dibandingkan daerah lain.

2. Cakupan permasalahan dalam tata kelola guru sekolah dasar di daerah 3T Kabupaten Yahukimo

Dalam pembahasan cakupan tata kelola guru sekolah dasar di Kabupaten Yahukimo yang menjadi temuan adalah permasalahan yang dialami dalam tata kelola guru sekolah dasar di daerah 3T lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, Kenyataan ini dilihat dari kondisi geografis yang sulit, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, minimnya jaminan kesejahteraan guru bahkan tidak sesuai dengan kesulitan yang guru hadapi di lapangan, keterbatasan dalam penggunaan pesawat, keterbatasan alat komunikasi, ketersediaan layanan kuota sertifikasi guru yang juga terbatas, biaya tunjangan khusus dan profesi yang tidak sesuai dengan kenyataan suit dilapangan. Dampak dari semua permasalahan diatas kebanyakan

Deleng Magayang, 2019

PENGLOLAAN PENDIDIKAN DASAR DI DAERAH 3T PROVINSI PAPUA INDONESIA

(Studi Tentang Tata Kelola Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua)

Universitas Pendidikan repository.upi.edu perpustakaan upi.edu

guru meninggalkan tempat tugas dan pengaruhnya sekolah mengalami kekosongan guru dan mengorbankan masa depan anak-anak.

3. Dampak yang di alami dalam proses pembelajaran yang sekolah dasar dengan kondisi ruang belajar yang dimiliki tingkat sekolah dasa rata-rata

Dalam pembahasan dampak kekurangan guru terhadap proses pembelajaran yang di sekolah dasar di daerah 3T adalah, jam belajar tidak sesuai dengan standar pendidikan nasional, seharusnya jam belajar untuk Sekolah dasar adalah 6 jam dalam satu hari. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan adalah siswa SD menerima pelajaran hanya 2 (dua) jam saja. Hal ini terjadi karena dari 160 sekolah di Kabupaten Yahukimo 148 sekolah memiliki satu orang guru merangkap jabatan kepala sekolah. Proses belajar mengajar yang di alami di sekolah adalah sistem pergantian jam belajar dan system yang lain adalah sistem penggabungan antara kelas I-III dan Kelas IV-VI. Yang dimaksud dengan sistem pergantian adalah karena keterbatasan guru dan ruang kelas, maka sistem yang digunakan adalah siswa kelas I-III masuk belajar mulai dari pukul 07.15 s/d 09.15. kemudian kelas IV-VI masuk menerima pelajaran 09.15-12.00 selesai dan pulang bersama-sama. Sehingga dampak yang terjadi adalah siswa tidak menerima pelajaran sama seperti siswa di perkotaan

Kegiatan proses pembelajaran yang di lakukan adalah jauh dari standar nasional pendidikan yang mana Negara memberikan pedoman pembelajaran seperti standari isi, standar kompetensi kelulusan, satndar proses pendidikan, standar sarana dan sarana pendidikan, standar pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan, standar penilaian dan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

4. Kebijakan dan strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini kepala dinas pendidikan

Dalam pembahasan kebijakan dan strategi dalam tata kelola guru sekolah dasar yang di lakukan oleh pemerintah dalam hal ini kepala dinas pendidikan, terkait pembahasan ini yang menjadi temuan adalah sejauh ini tidak pernah

Deleng Magayang, 2019

PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR DI DAERAH 3T PROVINSI PAPUA INDONESIA

(Studi Tentang Tata Kelola Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua)

Universitas Pendidikan repository.upi.edu perpustakaan upi.edu

dilakukan analisis kebutuhan guru di sekolah sehingga pemerintah setempat belum tahu angka sebenarnya kebutuhan guru sekolah dasar pada 160 SD di Kabupaten Yahukimo. Pembuktannya dapat dilihat dari tidak adanya rekrutmen guru yang dilakukan oleh pemerintah kabuapten Yahukimo membuat semua sekolah mengalami kekosongan guru dan siswa selaku anak bangsa yang seharusnya menerima pendidikan yang layak seperti anak-anak di perkotaan namun dikorbankan.

Program tahunan yang di susun oleh dinas pendidikan dalam hal ini tata kelola guru sekolah dasar yang berkaitannya dengan program pelatihan, program kualifikasi akademik guru, program rekrutmen guru, program bantuan khusus bagi calon-calon guru yang sedang mengikuti perkuliahan, program seminar bersama para guru dengan dinas, program kerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, program pelatihan kepemimpinan kepala sekolah secara berkala belum terlihat diagendakan. Program lain seperti tunjangan kesejahteraan guru yang bertugas di sekolah yang ditingkat pedesaan atau kecamatan dan banyak program yang memihak kepada guru benar-benar diabaikan sehingga guru mencari jalan sendiri hal yang sama dengan kepala sekolah berjalan sendiri. Gambaran ini sesungguhnya diperkuat dengan pengawas tidak pernah duduk bersama dengan kepala sekolah Hal ini disebabkan karena tidak ada kantor untuk pengawas dan penilik pendidikan di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo.

Dalam kaitannya dengan rekrutmen guru bahwa sejauh ini pemerintah belum pernah merencanakan dengan serius sumber rekrutmen guru termasuk di dalamnya mengenai pendanaan, bagaimana caranya memulai rekrutmen guru yang berkualitas. Seyogianya semua anak-anak di daerah terpencil akan sangat merindukan kehadiran sang guru yang membawa lentera di kala seluruh cahaya di dunia padam, merindukan guru yang mampu membangkitkan kehidupan mereka disaat anak-anak bangsa kehilangan arah dan tersesat dalam menjalani kehidupan mereka, bahkan dipastikan mereka lebih dan sangat rindu kehadiran sosok guru daripada kedua orangtua mereka.

5. Implementasi kebijakan dalam tata kelola guru sekolah dasar di Kabupaten Yahukimo.

Implementasi kebijakan dalam tata kelola guru sekolah dasar di Kabupaten Yahukimo adalah belum nyata secara keseluruhan. Implementasi Kebijakan yang di maksud adalah Rekrutmen guru, pelatihan guru, bidang kesejahteraan guru, sarana prasarana pendidikan, subsidi penerbangan, jaminan kesehatan guru dan tunjangan daerah bagi guru yang belum sertifikasi atau belum menerima tunjangan profesi. Hal ini penting karena adanya tunjangan profesi yang tidak merata semua guru yang sudah Sarjana (S-1) sehingga ada kecemburuan, iri hati dan kebanyakan guru meninggalkan tempat tugas dan berdampak kepada anak-anak bangsa yang di korbakan.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan guru di pendidikan dasar yang tidak sesuai dengan aturan adalah pemerintah merekrutmen guru-guru honorer yang nota benenya adalah lulusan SD,SMP dan SMA yang sebenarnya tidak mampu melanjutkan pendidikan. Mereka ini mengalami putus sekolah, kembali tinggal di kampung dan kemampuan mereka cara berpikir mereka adalah sama seperti siswa tapi kemudian diangkat guru bantu atau guru honorer daerah. Dilema pengangkatan yang semestinya tidak mengorbankan esensi guru yang berkualitas dan memiliki kompetensi pengabdian bahkan ilmu. Selanjutnya pemerintah tidak pernah memberikan pelatihan menjadi guru yang handal, tidak melakukan pengawasan terhadap Guru honorer daerah maupun guru pemerintah, hal yang sama dengan kondisi di Sekolah, tidak ada progress sehingga Guru akankah mengajar atau tidak pementingannya adalah siswa SD lulus ujian. Pemerintah tidak melihat hasil lulusan SD seperti apa, berapa banyak anak-anak yang melanjutkan SMP atau berapa anak yang tidak melanjutkan pendidikan.Tertinggal dalam hal kualitas dan kuantitas. Mestinya mendalami dengan benar spectrum kelulusan SD dari Yahukimo dan kemampuan bersaingnya di jenjang SMP dan selanjutnya.

Guru adalah lentera dikalah Perspektif pemerintah berkenaan dengan Guru yang bertugas di daerah 3T hingga kini masih menggunakan kaca mata yang sama dengan ASN yang bertugas di perkantoran (structural). Perubahan paradigma mengenai pementingan Guru SD di daerah 3T tidaklah similar dengan ASN structural perkantoran. Sebab Guru Menghadapi banyak tantangan dan hambatan guna menjalani panggilan bagi peningkatan isi proses pembelajaran. Mata hati pemerintah daerah dan pemerintah Pusat mesti terbuka melihat kenyataan sulitnya mereka menjalankan tugas pengabdianya. Posting anggaran kesejahteraan Guru di daerah 3T mesti terpisah dengan posting anggaran Guru di daerah perkotaan yang sudah lebih modern.

Guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik, guru mempunyai kekuasaan membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa. Namun dalam kenyataan tata kelola guru di daerah 3T Kabupaten Yahukimo bahwa guru itu tidak penting dengan anggapan demikian guru pergi ketempat tugas atau tidaknya tergantung pada guru itu sendiri, lebih parah lagi adalah tempat tinggal guru yang tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah dalam hal ini kepala dinas pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dan pimpinan yang lebih tinggi dari keluarga besar pendidikan di suatu daerah.

C. Implikasi

Berdasarkan Kesimpulan penelitian tersebut, dapat dikemukakan implikasi penelitian sebagai berikut:

Implikasi Pertama mengalami kekurangan guru terus menerus dan pemerintah tidak pernah berusaha untuk mengatasi kekurangan atau kekosongan guru maka, 20-30 tahun yang akan datang mengorbankan masa depan anak-anak bangsa yang seharusnya guru menjadi lentera bagi anak-anak dalam mengantarkan mereka kepada terang dalam menjalani kehidupan mereka sebagai anak-anak bangsa.

Implikasi kedua kondisi geografis yang sangat sulit, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya tunjangan kesejahteraan guru, tunjangan transportasi udara dengan subsidi pesawat bagi guru, maka yang masalah yang terus terjadi adalah guru meninggalkan tempat tugas dan terjadi kekosongan guru di sekolah lebih khusus sekolah-sekolah yang di tingkat kecamatan dan pedesaan.

Implikasi ketiga, dampak dari kekurangan guru dan sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah adalah proses pembelajaran tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Karena fungsi dari SNP adalah sebagai dasar yang melakukan perencanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat.

Implikasi keempat, Dampak dari kebijakan yang tanpa perencanaan yang baik adalah umpama perjalanan manusia tanpa tujuan hidup yang jelas, maka kebijakan handaknya diawali dengan perencanaan dan tujuan yang baik sehingga setiap kebijakan yang di ambil atas nama sebuah organisasi menjadi bermanfaat bagi rakyatnya. Dalam kenyataan bahwa setiap kebijakan yang di laksanakan belum ada penyelesaian permasalahan dalam tata kelola guru dan proses pembelajaran di sekolah, namun justru menambah masalah baru. Maka kualitas kelulusan siswa kelas enam yang tanpa memiliki bekal membaca, menulis dan menghitung untuk melanjutkan perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik.

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka berikut ini disajikan sejumlah rekomendasi dari penelitian ini

1. Untuk mengatasi terkait dengan tata kelola guru sekolah dasar dibutuhkan proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan distribusi guru secara transparan dan

merata. Salah satu kebijakan yang pemerintah daerah bisa lakukan adalah bersifat mengikat dan menjunjung tinggi profesionalisme guru.

2. Terkait persoalan demografis maka terdapat beberapa solusi yang pemerintah bisa dilakukan untuk mendukung efisiensi dan efektifitas proses pembelajaran antara lain, subsidi biaya transportasi udara, menyediakan alat penerangan berupa tenaga solar sel, penyediaan sarana air bersih, dan pemasangan Jaringan telekomunikasi di setiap wilayah.
3. Terkait dengan kesejahteraan guru SD di daerah 3T dibutuhkan pengawasan dan evaluasi terkait dengan tunjangan sertifikasi guru, tunjangan profesi guru, tunjangan khusus daerah terpencil. Tunjangan tambahan penghasilan serta tunjangan daerah. Disamping itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu meninjau ulang mengenai penambahan kuota guru tersifikasi dan bersyarat yang menyulitkan dalam penerimaan sertifikasi guru dan layanan keuangan yang tepat waktu dan tepat sasaran.
4. Menyusun peraturan daerah (Perda) atau peraturan Bupati (Perbup) yang menjamin ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan, dan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar (SPM-DIKDAS).
5. Pemerintah daerah perlu membuat regulasi khusus yang mengatur tentang guru Honorer daerah yang meliputi kualifikasi, kompetensi, tunjangan dan proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan distribusi guru.
6. Mengembangkan model pendidikan untuk peningkatan kualifikasi guru sekolah dasar di daerah Terpencil, Terisolir dan Tertinggal (3T) secara bertahap, berjenjang, berkelanjutan dan inklusif. Secara rinci model ini digambarkan dan diuraikan sebagaimana berikut ini.

A. Pradigma guru sekolah dasar

Model yang di kembangkan ini mencakup unsur-unsur pokok : Paradigma yang dijadikan dasar untuk mengembangkan model pendidikan untuk meningkatkan

kualifikasi dan kompetensi guru Sekolah Dasar di daerah terpencil, terisolir dan tertinggal adalah sebagai berikut:

1. Guru adalah lentera kehidupan anak bangsa di kala seluruh cahaya dunia padam, guru adalah pembangkit hidup di saat anak-anak bangsa kehilangan arah dan tersesat dalam menjalani kehidupan. Jasa gurulah anak-anak bangsa bisa mendapatkan dan mencapai cita-citanya. Berkat gurulah anak bangsa menemukan jati diri yang sesungguhnya, guru adalah penuntun anak bangsa menuju masa depan yang cerah. Guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik, guru mempunyai kekuasaan membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa. Namun dalam kenyataan tata kelola guru di daerah 3T Kabupaten Yahukimo bahwa guru itu tidak penting dengan anggapan demikian guru pergi ketempat tugas atau tidaknya tergantung pada guru itu sendiri, lebih parah lagi adalah tempat tinggal guru yang tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah dalam hal ini kepala dinas pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dan pimpinan yang lebih tinggi dari keluarga besar pendidikan di suatu daerah.
2. Cita-cita diatas hanya mungkin di wujudkan melalui proses pendidikan yang dilandasi oleh keyakinan, komitmen, dedikasi yang tiada henti dan berkesinambungan sepanjang hayat.
3. Sekolah dasar khususnya di daerah terpencil, terisolir dan tertinggal (3T) merupakan langkah mendasar yang strategis yang harus tersedia untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada setiap anak bangsa. Sekolah dasar bagi mereka bukan hanya tempat untuk memperoleh pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai kehidupan tetapi yang mendasar adalah tempat untuk membangun potensi yang didalam diri untuk tumbuh berkembang sebagai modal dasar bagi kehidupan anak bangsa ini di masa depan.

4. Tata kelola guru merupakan keniscayaan yang harus dapat menjamin ketersediaan guru yang di butuhkan untuk terselenggaranya proses pendidikan khususnya sekolah dasar di daerah 3T.
5. Tata kelola guru ini juga dapat menyediakan kesempatan pendidikan bagi guru yang bertugas di sekolah dasar di daerah 3T yang secara professional belum memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran di sekolah dasar yang di harapkan.
6. Pendidikan untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru tersebut mencakup program pendidikan secara berjenjang, bertahap, berkelanjutan dan inklusif.
7. Program pendidikan berjenjang mengandung makna dari level satu dalam hal ini paket kejar B plus keguruan bagi guru yang hanya memiliki latar belakang pendidikan sekolah dasar, level dua dalam hal ini paket C plus Keguruan bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah pertama dan level tiga dalam hal S-1 PGSD perguruan tinggi bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah atas.
8. Bertahap mengandung makna proses pembelajaran yang ditempuh secara tertib, teratur, sistematis, dalam setiap level yang dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan bagi guru sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya dari level satu ke level dua dan akhirnya ke level tiga.
9. Berkelanjutan mengandung makna pendidikan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru ini tidak boleh hanya mencakup satu level saja tetap wajib berlanjut ke level berikutnya hingga menuju ke level yang paling tinggi untuk menghasilkan guru professional yang berkualitas sesuai dengan standar pendidikan guru yang ditetapkan secara nasional.
10. Inklusif mengandung makna program pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan sangat fleksibel dan memiliki cakupan yang komprehensif yang tidak dibatasi oleh pria atau wanita (tidak hanya usia populasi sekolah,

jarak dan tempat serta mekanisme penyelenggaraan sesuai dengan prinsip pendidikan luar sekolah dan prinsip pendidikan sepanjang hayat.

B. Rasional

Alasan utama mengapa model ini dirumuskan sebagai salah satu rekomendasi penelitian ini adalah karena model secara jelas merumuskan kebijakan untuk mengatasi kualifikasi dan kompetensi guru yang sekarang menjadi masalah besar dalam penyelenggaraan sekolah dasar di daerah 3T. Fokus kebijakan harus diletakan pada bagaimana kualifikasi dan kompetensi guru SD yang ada ditingkatkan melalui program paket B plus keguruan, paket C Plus keguruan, dan program S1 PGSD. Secara rinci ketiga program ini di uraikan sebagai tercantum di bawa ini:

1. Program Paket **B** Plus keguruan merupakan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru sekolah dasar di daerah terpencil, terisolir dan tertinggal (3T) dimana saat ini yang menjadi guru adalah mereka yang sebenarnya putus sekolah karena banyak factor dan tinggal di kampung yang tidak layak menjadi guru.
2. Program Paket **C** Keguruan adalah program peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru sekolah dasar dimana saat ini telah memiliki Ijazah Sekolah Menengah pertama dan sedang mengajar sebagai guru honorer daerah, yang tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu keguruan seperti, Metode mengajar, cara penilaian, cara manajemen kelas, cara menyusun silabus dan Rencana pelaksanaan pembelajaran, dan guru sendiri belum lancar membaca, menulis dan menghitung.
3. Program S-1 Pendidikan guru sekolah dasar (S-1 PGSD) terbuka merupakan paket program khusus yang wajib di ikuti oleh guru yang sudah memiliki Ijazah Pake C Keguruan sebagai guru profesi.

C. Tujuan

Tujuan dari model pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat ini adalah

1. Menjawab kekurangan guru sekolah dasar di daerah Terpencil, Terisolir dan Tertinggal (3T) Kabupaten Yahukimo
2. Memperbaiki kualitas guru pendidikan sekoah dasar dalam proses pembelajaran di daerah 3T Kabupaten Yahukimo.
3. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru sekolah dasar yang sedang mengajar dengan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan.
4. Membimbing dan mengantarkan guru tamatan SD dengan program paket B Plus keguruan, Tamatan SMP dengan program Paket C Keguruan dan Program S-1 Pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru sesuai dengan amanat UU guru dan Dosen.

D. Program peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru

Program peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru ini mencakup 3 level yang terdiri dari adalah:

1. Level 1 : Program keaksaraan fungsional dengan paket B Plus Keguruan bagi guru honorer yang memiliki Ijazah Sekolah dasar dan menjadi guru.
2. Level 2 : Program Paket C Keguruan dengan bagi guru honorer yang memiliki Ijazah SMP dan sendang mengajar sebagai status guru tidak tetap.
3. Level 3 : Program Paket S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Terbuka adalah bagi guru Sekolah Dasar yang diangkat sebagai guru honorer daerah.

E. Isi program

Isi dari program ini adalah

1. Level 1 : Belajar mengajar tanpa batas waktu dan tempat. Artinya bahwa

program ini tidak seperti sekolah formal yang harus memiliki gedung sekolah dan waktu belajar yang sudah di tentukan secara nasional. Namun program ini kapan dan dimana saja belajar. Baik itu dikantor, di gereja, di rumah dan setiap saat selagi waktu masih digunakan untuk belajar.

2. Level 2 : Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan seperti:
 - ↳ Kelompok mata pelajaran agama
 - ↳ Kelompok mata pelajaran Umum
 - ↳ Kelompok mata pelajaran ilmu keguruan
 - ↳ Kelompok mata pelajaran muatan lokal
 - ↳ Dan wajib praktek lapangan dengan pendampingan oleh Tutor.
3. Level 3. Memberikan layanan khusus dengan kerjasama pemerintah daerah seperti pembiayaan, sarana pembelajaran, penandatanganan sertifikat guru dan Surat keputusan Bupati tentang pengakuan status guru dalam sebuah surat keputusan kepala dinas atau Bupati setempat.

F. Proses pembelajaran

Program tahap

1. Kelompok mata pelajaran
 - Kelompok mata pelajaran agama
 - Kelompok mata pelajaran keahlian (keguruan)
 - Kelompok Mata pelajaran Ilmu pengetahuan teknologi
2. Prinsip pengembangan kurikulum
 - Berpusat padanpotensi, kebutuhan,dan kepentingan peserta didik sesuai dengan kebutuhan guru suka rela yang sampai saat ini masih mengajar sebagai formalitas.
 - Beragam dan terpadu antara mata pelajaran umum dan keguruan.
 - Menyeluruh dan kesinampungan
 - Belajar sepanjang hayat
 - Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah

- Partisipatif

3. Prinsip pelaksanaan kurikulum

- Memperhatikan kebutuhan dan peluang daerah
- Memperhatikan karakteristik daerah
- Pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan percepatan
- Prinsip *ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handa yani*.
- Mendedayakan kekayaan, keunggulan dan kearifan lokal.

4. Perpindahan antar jalur dan jenjang

- Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, Nonformal, dan Informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi.
- Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak pindah ke orogram jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
- Kesenambungan, keterkaitan, dan kesinambungan antar jenis jenjang pendidikan.

5. Struktur kurikulum yang digunakan dalam model pengembangan ini adalah

- Keterampilan fungsional;
- Pengembangan kepribadian profesional;
- Fleksibel dalam ruang, waktu dan strategi pembelajaran, serta menghargai pengalaman, belajar peserta didik yang diperoleh dalam kehidupan.

6. Beban belajar

- Beban belajar yang di setara dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK)
- SKK merupakan modifikasi dari SKS, hanya berhitungan satuan berbasis capaian kompetensi bukan kebutuhan waktu pembelajaran ;
- Dengan SKK diharapkan lebih dapat menghargai pengalaman belajar mandiri yang selama ini banyak dilakukan di kalangan masyarakat.

7. Kurikulum tingkat satuan pendidikan

- Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus pendidikan kesetaraan diterapkan oleh Dinas pendidikan sesuai dengan tingkat kewenangannya;
- Kurikulum dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan
- Kurikulum tingkat satuan pendidikan berbedoman pada panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan kesetaraan.

8. Tempat pelaksanaan

Tempat pelaksanaan program paket tidak terbatas pada tempat dan gedung yang permanen seperti pendidikan formal. Program ini dilaksanakan dimana saja dan kapan saja serta siapa saja.

Program Paket melaksanakan di masing-masing wilayah termasuk ibu kota Yahukimo di Dekai. Program proses pembelajaran menyesuaikan diri dengan kondisi objektif setempat.

9. Tahapan-tahapan pelaksanaan.

a. Tahap pembukaan PKBM

Program PKBM dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Pengurusan surat ijin pendirian di Dinas pendidikan
- Pengurusan AKta Notaris
- Pengurusan SK menkumham
- Pengurusan NPWP
- Pembukaan rekening lembaga.

b. Tahap persiapan

- Rekrutmen peserta didik dengan sosialisasi kepada masyarakat
- Pendaftaran peserta didik
- Kriteria peserta didik seperti guru yang mengajar dengan Berijazaj SD,SMP dan SMA

c. Tahap pelaksanaan

- Proses pembelajaran berlangsung
- Waktu belajar
- Tempat belajar
- Penanggung jawab

d. Tahap Evaluasi

- Hasil Tes yang dilakukan oleh tutor
- Hasil praktek mengajar di sekolah
- Absen kehadiran peserta didik
- Hasil ujian lulusan Ujian Paket B,C dan paket S-1 Keguruan.

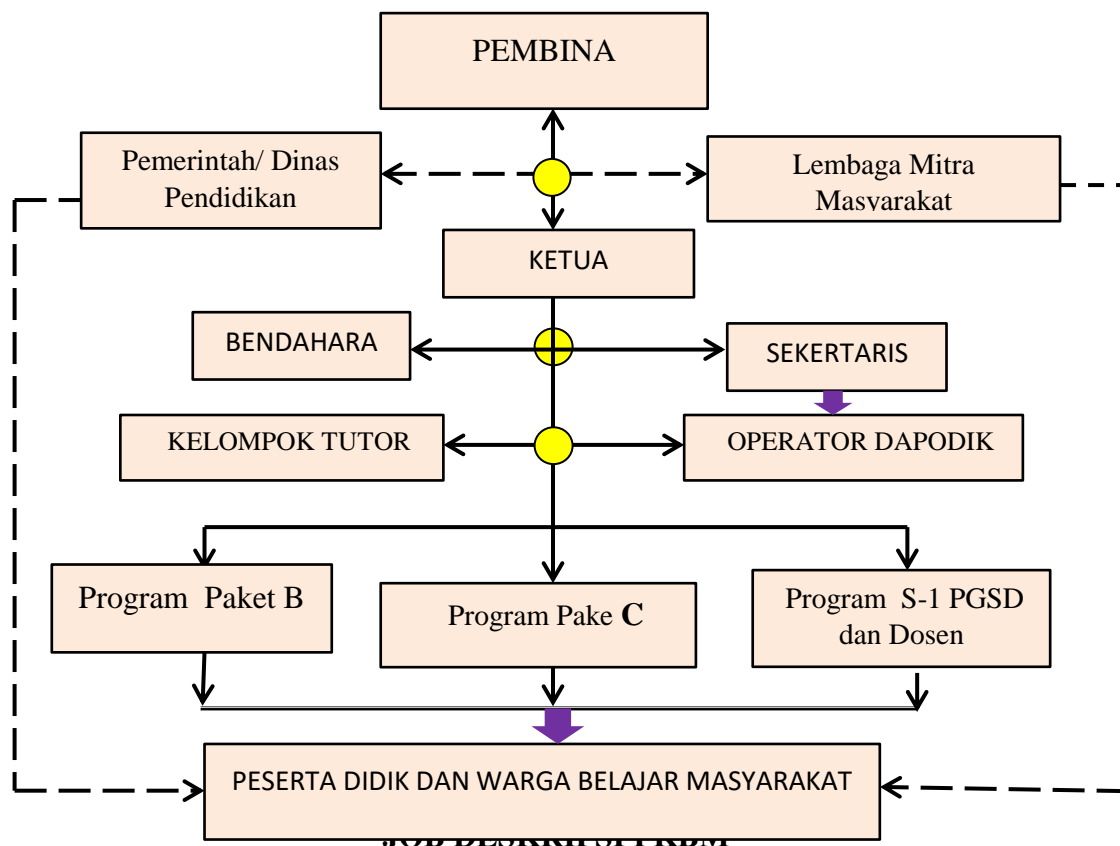
G. Organisasi dan manajemen

Organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh program kualifikasi dan kompetensi ini di letakan di dalam PKBM. Pemerintah daerah berfungsi sebagai penanggung jawab utama sedangkan Dinas pendidikan kabupaten berfungsi sebagai penganggung jawab operasional pelaksanaan program melalui kerjasama yang erat dengan PKBM.

System tata kelola program di kembangkan secara khusus sesuai dengan tujuan dan proses pembelajaran yang telah diuraikan. Tata kelola ini dipimpin oleh dinas pendidikan kabupaten dengan kerjasama dengan PKBM. Untuk melaksanakan keseluruhan program dinas pendidikan kabupaten mengeluarkan kebijakan tentang tata kelola program secara operasional dalam bentuk panduan.

Secara rinci keeluruhan model ini dituangkan dalam gambar dan uraian berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PKBM



Pelindung Penasehat & Pembina

1. Memberikan masukan, saran, pendapat kepada penyelenggara
2. Memberikan kontribusi pemikiran
3. Mendorong kemajuan pelaksanaan program yang efektif dan berkesinambungan

Ketua

1. Memimpin jalannya PKBM sesuai Tujuan, Visi dan Misi, Membina, mengarahkan pengurus dan anggota serta menjalin hubungan dengan Instansi Pemerintahan PKBM/Lembaga/Organisasi lain diluar PKBM

2. Merencanakan/perencanaan (merencanakan hal/kegiatan yang akan dilakukan), Mengorganisir (mengatur dan membagi tugas dan tanggungjawab/ pendelegasian kepada bawahan), Mengontrol, (mengecek atau meminta laporan kemajuan kegiatan), serta mengkoordinasi, Membagi tugas dan kerjasama antar para Seksi dalam kegiatan diluar maupun saat-saat rapat.
3. Melakukan negosiasi dengan Dinas Pendidikan sebagai pelindung, terutama mengenai Kesejahteraan PKBM
4. Penanggungjawab seluruh kegiatan yang ada di PKBM menentukan dan menetapkan kebijakan pokok yang dilakukan oleh PKBM secara proporsional, mengevaluasi serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina secara berkala tentang seluruh kegiatan program yang berlangsung di PKBM
5. Bertanggungjawab terhadap segala sesuatu/ kegiatan yang telah diprogramkan oleh setiap Seksi didalam jajaran struktural PKBM Memberikan teguran dan arahan kepada para Seksi dan anggota lainnya yang ada didalam jajaran struktural PKBM TUNAS PAPUA apabila tidak menjalankan tugas.

Sekretaris

1. Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal pengembangan PKBM
2. Menyusun program kerja, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
3. Membuat Surat Keputusan yang dikeluarkan Ketua, Surat Keputusan Delegasi dan Surat Keputusan para Seksi dan Koordinator.
4. Mengarahkan setiap Seksi-Seksi dalam hal penyelenggaraan kegiatan pada Satuan Program Yang Diselenggarakan, mulai dari penataan administrasi berkas, Kegiatan Belajar Mengajar bidang pendidikan Nonformal dan Informal serta manajemen kearsipan PKBM
5. Membuat Surat Permohonan Bantuan Dana (proposal).
6. Memfasilitasi ruang dan waktu untuk kepentingan lembaga.
7. Membuat laporan pertanggungjawaban, atas pelaksanaan kegiatan.

8. Bertanggungjawab terhadap segala sesuatu/ kegiatan yang telah diprogramkan oleh setiap Koordinator pada Satuan Program Yang Diselenggarakan.
9. Berkoordinasi dengan Ketua untuk merumuskan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan Satuan Program Yang Diselenggarakan dan kesejahteraan anggota serta sistem informasi PKBM

Bendahara

1. Membukukan segala pengeluaran, menerima, mencatat tanggal uang masuk beserta sumber dan jumlah dana.
2. Meminta persetujuan ketua sebelum mengeluarkan uang, dan berkoordinasi langsung dengan anggota.
3. Membuat laporan secaraberkala terkait dengan biaya pengeluaran yang dilakukan pada saat penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan program kerja dari masing-masing Koordinator Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Kursus pada PKBM

Koordinator Paket Kejar

1. Membangun kerjasama dengan Ormas, lembaga, Instansi Swasta/Negeri terkait dengan perluasan dan pengembangan PKBM
2. Mensosialisasikan setiap program kerja yang telah/ belum terbentuk serta yang akan dijalankan dari masing-masing koordinator pendidikan paket kejar B,C dan S-1 PGSD
3. Membangun suatu sistem yang dinamis dan harmonis diluar PKBM dengan Perusahaan, Instansi Pemerintahan dan Institusi Pendidikan terkait hal penyaluran Sumber Daya Manusia sebagai tenaga kerja dan pemasaran Sumber Daya Alam lokal tidak hanya didalam akan tetapi diluar Wilayah Kabupaten Yahukimo.

4. Bekerja sama atau berkoordinasi dengan Ketua dan Sekretaris terutama mengenai hal-hal penandatanganan kontrak kerjasama program antara PKBM dengan pihak-pihak pengguna jasa serta informasi yang ingin disampaikan kepada publik.
5. Melakukan pendataan aset PKBM segala kebutuhan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan yang akan diselenggarakan, mulai dari modul, pendataan calon siswa dan guru bidang studi yang mengajar.

Koordinator Pendidikan Kesetaraan

1. Mempersiapkan segala kebutuhan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang akan diselenggarakan, mulai dari silabus, modul, pendataan calon siswa dan guru bidang studi yang mengajar dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Mengkoordinir serta penuh tanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pendidikan kesetaraan meliputi pembelajaran Program kejar paket B setara SMP, program kejar paket C setara SMA dan S-1 PGSD Perguruan tinggi. Dan berupaya untuk tetap menggunakan metode yang baik disesuaikan dengan tingkat peserta didik.
3. Membuat Laporan berkala (berkas dan foto-foto hasil kegiatan), mulai dari awal penyelenggaraan sampai dengan berakhirnya program Pendidikan Kesetaraan dan seterusnya. Selanjutnya diserahkan kepada Seksi Pendidikan sebagai arsip kegiatan dan atau laporan pertanggungjawaban.
4. Membuat segala kelengkapan administrasi Kegiatan Belajar Mengajar yang dibutuhkan oleh para Koordinator Pendidikan seperti absensi warga belajar, staf pengajar, asisten pengajar dan lainnya dirasa perlu.
5. Mengkoordinir para Koordinator Pendidikan terkait hal penyusunan program kerja, silabus dan modul bahan ajar bagi warga belajar serta kebutuhan perlengkapan alat

peraga atau praktek pada saat penyelenggaraan proses Kegiatan Belajar Mengajar.

6. Mengarahkan para Koordinator Pendidikan, secara bersama-sama mengoptimalkan secara optimal semua Sumber Daya Manusia, Aset dan Sarana/ prasarana milik PKBM
7. Mencari atau mensurvei tempat – tempat penyelenggaraan kegiatan dan mengusahakan pelaksanaan kegiatan (khususnya bidang *Life Skill*) serta tempat acara kegiatan.
8. Mengumpulkan laporan penyelenggaran Kegiatan Belajar Mengajar dari setiap Koordinator Pendidikan dan seterusnya menyusun laporan kegiatan tersebut menjadi sebuah arsip dalam bentuk *softfile* dan *hardfile*, dan seterusnya diserahkan kepada Sekretaris sebagai laporan hasil kegiatan.
9. Mempersiapkan segala kebutuhan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan yang akan diselenggarakan, mulai dari modul, pendataan calon siswa dan guru bidang studi yang mengajar.
10. Mengkoordinir serta penuh tanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pendidikan keaksaraan dan tetap konsisten untuk mewujudkan masyarakat yang madani, beriman, serta bermoral.
11. Membuat Laporan berkala (berkas dan foto-foto hasil kegiatan), mulai dari awal penyelenggaraan sampai dengan berakhirnya program Pendidikan Keaksaraan dan seterusnya. Selanjutnya diserahkan kepada Seksi Pendidikan sebagai arsip kegiatan dan atau laporan pertanggungjawaban.

Koordinator Life Skill

1. Mempersiapkan segala kebutuhan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan kecapakan khusus (*lifeskill*) yang akan diselenggarakan, mulai dari modul, pendataan calon siswa dan guru bidang studi yang mengajar.

2. Mensosialisasikan pentingnya belajar kecakapan khusus (*lifeskill*) dikalangan masyarakat dan pelajar yang ada di Kabupaten Kampar.
3. Membina dan mengajarkan pembelajaran kecakapan khusus (*lifeskill*) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah seperti Keteknikan, Perikanan, Pertanian, Kerajinan Khas Daerah, Kepemimpinan (*leadership*), *Gender* dan Sosial Masyarakat secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya.
4. Mempersiapkan segala kebutuhan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Kursus yang akan diselenggarakan, mulai dari silabus, modul, pendataan calon siswa dan guru bidang studi yang mengajar.
5. Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan Pendidikan Kursus yang ada di Kabupaten Simeulue yang meliputi pembelajaran Komputer, Bahasa Asing dan Bimbingan Test/ Bimbingan Studi (BT/BS) serta mensosialisasikan pentingnya pendidikan kursus untuk dapat menambah Ilmu dan wawasan.
6. Membuat Laporan berkala (berkas dan foto-foto hasil kegiatan), mulai dari awal penyelenggaraan sampai dengan berakhirnya program Pendidikan Umum dan seterusnya dikoordinasikan kepada Manager Operasional, selanjutnya berkas diserahkan kepada Bidang Administrasi.
7. Membuat Laporan berkala (berkas dan foto-foto hasil kegiatan), mulai dari awal penyelenggaraan sampai dengan berakhirnya program Pendidikan Kecakapan Khusus (*lifeskill*) dan seterusnya. Selanjutnya diserahkan kepada Seksi Pendidikan sebagai arsip kegiatan dan atau laporan pertanggungjawaban.

